



Peserta Pemilu Serahkan LPSDK

YOGYA, TRIBUN - Seluruh peserta Pemilu 2019 telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Komisiner KPU Kota Yogyakarta, Ertzal menjelaskan bahwa Kamis (3/1), pihaknya telah melakukan rekapitulasi laporan yang telah masuk tersebut. "Kami umumkan, baik melalui website KPU maupun papan pengumuman yang ada di KPU," terangnya, Kamis (3/1).

Berdasarkan laporan tersebut, dapat diketahui masing-masing sumbangan dana yang diterima parpol maupun capres cawapres. PKB total Rp2,2 juta dalam bentuk 8 jasa. Gerindra Rp522 juta dalam bentuk 1 jenis barang dan 39 jasa. PDIP total Rp621 juta dalam bentuk 16 tunai, 2 jenis barang, dan 26 jasa. Golkar total Rp124 juta dalam bentuk 22 jasa.

Selanjutnya, Nasdem total Rp96 juta dalam bentuk 21 jasa. Partai Garuda nihil. Partai Berkarya total Rp21 juta dalam bentuk 1 tunai dan 4 jasa. PKS nihil. Partai Perindo total Rp24,5 juta dalam bentuk 8 tunai dan 2 jenis barang. PPP total Rp8,25 juta dalam bentuk 1 jenis barang.

Kemudian, PSI nihil. PAN Rp4,2 juta dalam bentuk 4 jasa. Partai Hanura nihil. Partai Demokrat total Rp30 juta dalam bentuk 14 jasa. PBB total Rp9,7 juta dalam bentuk 2 jenis barang dan 5 jasa. PKPI nihil. "Selanjutnya untuk capres 01 nihil dan capres 02 sumbangan total Rp1,8 juta dalam bentuk 1 jenis barang," urai Ertzal.

Laporan tersebut, lanjutnya, diserahkan mereka baik yang sudah menerima sumbangan, maupun belum menerima sumbangan dari rentang 3 September 2018-1 Januari 2019. Ertzal menyebut minimal laporan tersebut dituangkan dalam 3 halaman.

"Kalau sumber sumbangannya, berdasarkan regulasi yang ada, berasal dari perorangan, kelompok, dan caleg. Tapi yang masuk ini, rata-rata sumbangan perorangan dan dana pribadi parpol serta caleg. Kalau sumbangan kelompok belum ada," terangnya.

Ia menyebut bahwa sumbangan dari partai politik rata-rata dalam bentuk barang, misalkan bendera partai politik. Selain itu ada juga pengeluaran caleg berupa jasa masuk sebagai sumbangan ke partai politik. "Semuanya kami hitung nilainya dalam rupiah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KPU DIY, Siti Ghoniyatun, saat ditemui di kantornya menjelaskan, dari 16 parpol, 11 calon anggota DPD, dan 2 pasangan capres cawapres yang menjadi peserta pemilu di DIY, ada 1 parpol yang tidak menyerahkan LPSDK dan 1 parpol yang terlambat menyerahkan.

"Yang menyerahkan ada 15, yang tidak menyerahkan dari PKPI dan yang terlambat menyerahkan dari Hanura. Jadwal terakhir memang kemarin (Rabu, 2 Januari 2019) pukul 18.00 WIB. Untuk alasan tidak menyerahkan kami tidak tahu persis," ucapnya.

Ghoni mengungkapkan jika KPU sudah berusaha menghubungi pihak PKPI dan sebelumnya sudah melayangkan surat, namun tidak ada respons. "Kita sudah berusaha hubungi, kita juga sudah bersurat tetapi tidak ada respons. Kami juga tidak tahu ada apa. Kita sudah sampaikan informasi berkaitan dengan LPSDK, dari mulai jadwal dan ketentuan. Ketika ada bimtek juga kita undang, tapi tidak hadir," urainya.

Mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Hanura, Ghoni menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan proses klarifikasi di berita acara yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum KPU.

||

Kita sudah berusaha hubungi, kita juga sudah bersurat tetapi tidak ada respons. Kami juga tidak tahu ada apa. Kita sudah sampaikan informasi berkaitan dengan LPSDK, dari mulai jadwal dan ketentuan. Ketika ada bimtek juga kita undang, tapi tidak hadir.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005